

Postpartum Family Planning Service at UPTD Puskesmas Nusa Penida I of Klungkung Regency

Pelayanan KB Pasca Persalinan di UPTD Puskesmas Nusa Penida I Kabupaten Klungkung

Putu Agus Sukma Karisma¹, Made Nyandra^{2*}, Ni Made Kurniati³

^{1,2,3}Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia

(*)Corresponding Author: madenyandra@undhirabali.ac.id

Article info

<p>Keywords: Contraception, Postpartum, Evaluation</p>	<p style="text-align: center;">Abstract</p> <p><i>Postpartum family planning is a contraceptive method that begins to be used after childbirth up to a period of 42 days which aims to prevent closely spaced or unintended pregnancy. The achievement of postpartum family planning in Klungkung Regency in 2021 was 29.3%. The lowest achievement was found in the UPTD Puskesmas Nusa Penida I (13%) which was inversely proportional to the high coverage of ANC and postpartum visits. This study aimed to evaluate postpartum family planning services at UPTD Puskesmas Nusa Penida I from the aspects of input, process and output. This study used a qualitative descriptive approach. Data were obtained from informants selected using purposive sampling technique. Analysis was conducted using thematic analysis method. The study found that there were 21 midwives at the UPTD Puskesmas Nusa Penida I. A total 2 midwives had received training on postpartum family planning. All seven auxiliary health centers have 1 midwife, but 5 of them do not have a nurse. In the output aspect, the achievement of postpartum family planning services until May 2023 in the study location is still relatively low. The conclusion of this study is that the low coverage of postpartum family planning services at the UPTD Puskesmas Nusa Penida I is related to weaknesses in the human resources element, namely workload factors and training experience. In addition, some community characteristics that were found to be constraining factors were low knowledge, parity and lack of husband support.</i></p>
<p>Kata kunci: Kontrasepsi, Pasca Persalinan, Evaluasi</p>	<p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>KB pasca persalinan adalah metode kontrasepsi yang mulai digunakan setelah melahirkan hingga kurun waktu 42 hari yang bertujuan untuk mencegah jarak kehamilan yang terlalu dekat atau kehamilan yang tidak diinginkan. Capaian KB pasca persalinan Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 adalah 29,3%. Capaian terendah ditemukan pada UPTD Puskesmas Nusa Penida I, yaitu sebesar 13% yang justru berbanding terbalik dengan capaian cakupan ANC dan kunjungan nifasnya yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan KB pasca persalinan di UPTD Puskesmas Nusa Penida I dari aspek input, proses dan output. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui metode obeservasi, telaah dokumen dan wawancara mendalam dengan delapan orang informan yang dipilih dengan teknik</p>

purposive sampling. Analisis dilakukan dengan metode thematic analysis. Pada penelitian ditemukan bahwa bidan di UPTD Puskesmas Nusa Penida I berjumlah 21 orang. Sebanyak 2 orang sudah memperoleh pelatihan KB pasca persalinan. Ketujuh puskesmas pembantu telah memiliki 1 orang bidan, namun 5 diantaranya belum memiliki tenaga perawat. Pelaksanaan pelayanan KB pasca persalinan didasarkan pada pedoman dari Kementerian Kesehatan. Pada aspek output, capaian pelayanan KB pasca persalinan hingga Bulan Mei 2023 di lokasi penelitian masih tergolong rendah. Kesimpulan penelitian ini adalah cakupan pelayanan KB pasca persalinan yang rendah di UPTD Puskesmas Nusa Penida I berkaitan dengan kelemahan pada unsur SDM, yaitu faktor beban kerja dan pengalaman pelatihan. Selain itu, beberapa karakteristik masyarakat yang ditemukan menjadi faktor kendala adalah pengetahuan yang rendah, paritas dan kurangnya dukungan suami.

PENDAHULUAN

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan standar kesehatan yang memadai akan meningkatkan risiko timbulnya permasalahan yang berakar pada penurunan kualitas sumber daya manusia seperti pengangguran, kemiskinan, kriminalitas yang memberikan dampak negatif pada kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah menjalankan program Keluarga Berencana.

Salah satu bagian dari Program KB yang menjadi kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 adalah KB pasca persalinan (Kemenko PMK, 2020). KB pasca persalinan adalah metode kontrasepsi yang mulai digunakan setelah melahirkan hingga kurun waktu 42 hari yang bertujuan untuk mencegah jarak kehamilan yang terlalu dekat atau kehamilan yang tidak diinginkan. Capaian KB pasca persalinan Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 adalah 29,3%. Capaian terendah ditemukan pada UPTD Puskesmas Nusa Penida I, yaitu sebesar 13% yang justru berbanding terbalik dengan capaian cakupan ANC dan kunjungan nifasnya yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan KB pasca persalinan di UPTD Puskesmas Nusa Penida I dari aspek input, proses dan output.

METODE

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan pada bulan Juni 2023 dengan metode observasi, telaah dokumen dan wawancara mendalam. Informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan terdiri dari pemegang program KIA-KB, kepala puskesmas, dua orang bidan puskesmas dan empat masyarakat. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode *Thematic Analysis*. Tahapan analisis meliputi pengumpulan data, pemahaman data, *coding* dan penentuan tema.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Aspek input terdiri dari unsur *Man, Money, Machine, Material* dan *Method*. Pada unsur *Man*, diperoleh data ketersediaan SDM untuk pelayanan KB pasca persalinan yaitu 21 bidan. Menurut kompetensi, seluruh tenaga bidan sudah berlatar pendidikan DIII, namun hanya dua orang yang pernah mendapat pelatihan (KB pasca persalinan dan KB pasca plasenta) dan belum ada bidan yang mendapat pelatihan CTU maupun KIP/K. Pada unsur *Money*, pemanfaatan anggaran antara lain untuk pengadaan BMHP dengan dana BLUD, operasional penyuluhan dengan dana BOK serta penjaminan biaya akseptor dari BPJS. Unsur *Machine* yang ditemukan terdiri dari prasarana berupa ruang poli KIA dan ruang bersalin untuk konseling dan pelayanan KB, ABPK, alat kesehatan berupa IUD kit dan implant removal kit yang seluruhnya dalam kondisi baik. Alat kontrasepsi dan BMHP yang termasuk unsur *Material* tersedia untuk persediaan dua bulan yang terdiri dari pil progestin, suntik progestin, implan, IUD dan kondom. Pada unsur *Method*, acuan yang dipergunakan adalah Buku Pedoman Pelayanan KB Pasca Persalinan dari Kementerian Kesehatan yang kemudian diturunkan ke dalam bentuk SOP.

Aspek proses terdiri dari *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*. Tahap *planning* terdiri dari penghitungan sasaran dan kebutuhan alat kontrasepsi. Jumlah sasaran KB pasca persalinan puskesmas di Kabupaten Klungkung sudah diberikan oleh Dinas Kesehatan dan target ditetapkan sebesar 80%. Kebutuhan alat kontrasepsi didasarkan pada rerata pengeluaran tiga bulan terakhir dan dikalikan untuk kebutuhan dua hingga empat bulan. Tahap *Organizing* ditandai dengan distribusi satu tenaga bidan di tiap puskesmas pembantu dan pembagian tugas bidan di puskesmas induk sebagai pemegang program dan pemberi pelayanan. Tahap *Actuating* terdiri dari konseling KB dan pelayanan kontrasepsi. Konseling dilakukan di poliklinik, ruang bersalin atau kelas ibu hamil saat ANC, persalinan atau kunjungan nifas. Pelayanan kontrasepsi dilakukan di puskesmas pembantu maupun puskesmas induk. Tahap *Controlling* terdiri dari pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dilakukan pada form K1/KB, K4/KB, informed consent, register, RM puskesmas dan PWS KIA. Pelaporan dilakukan kepada Dinas Kesehatan (PWS) dan BKKBN (Form K4/KB dan register (R1/KB dan R2/KB).

Pada aspek Output, cakupan KB Pasca Persalinan di UPTD Puskesmas Nusa Penida I pada Bulan Januari adalah 3,44%, Bulan Pebruari sebesar 16.1%, Bulan Maret sebesar 6.3%, Bulan April sebesar 36% serta Bulan Mei sebesar 8.7%. Secara kumulatif, persentase cakupan pelayanan KB pasca persalinan dari total persalinan hingga Bulan Mei 2023 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Nusa Penida I adalah 26,4%. Bila diukur menurut jumlah sasaran tahunan, maka persentase cakupannya adalah 10,33%.

Pembahasan

Pada aspek *Man*, Sumber daya manusia yang dimaksud dalam pelayanan KB Pasca Persalinan adalah seluruh tenaga bidan yang terlibat dalam UKM Kesehatan Reproduksi serta UKP Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana. Jumlah bidan di UPTD Puskesmas Nusa Penida I adalah sebanyak 21 orang dengan rincian 13 orang bertugas di Puskesmas Induk dan 8 orang di Puskesmas Pembantu. Jumlah tersebut sudah memenuhi sebagaimana

disebutkan oleh Permenkes No.43 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa jumlah minimum tenaga pada puskesmas induk rawat inap di pedesaan adalah minimal 7 orang untuk tenaga bidan. Namun demikian, diperoleh keterangan yang menunjukkan keterbatasan pada aspek ketenagaan bila dibandingkan dengan kegiatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, pada setiap puskesmas pembantu harus ada setidaknya satu orang bidan dan satu orang perawat. Sementara itu, sebanyak 5 dari 7 puskesmas pembantu di Puskesmas Nusa Penida I belum memiliki tenaga perawat sehingga meningkatkan beban kerja bidan desa.

Pada UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan disebutkan ada dua jenis bidan, yaitu bidan vokasi yang memiliki pendidikan diploma III kebidanan dan bidan profesi yang memiliki latar pendidikan diploma IV/sarjana ditambah pendidikan profesi. Menurut peraturan ini, bidan vokasi dan profesi memiliki kewenangan dalam pemberian pelayanan KB. Menurut Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan, pelayanan konseling KB pasca persalinan dilakukan oleh petugas kesehatan dan petugas pelayanan KB yang telah mendapatkan pelatihan Konseling KBPP atau Konseling KB atau pelatihan KIP/K. Menurut Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat Dalam RPJMN Dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, standar minimal untuk terlaksananya pelayanan KB pasca persalinan di puskesmas adalah setidaknya ada dua tenaga bidan dan/atau dokter yang telah mendapat pelatihan CTU/KB/orientasi KBPP. Melihat hasil wawancara, maka disimpulkan bahwa jumlah tenaga terlatih di UPTD Puskesmas Nusa Penida I sudah memenuhi standar minimal untuk pelayanan KB pasca persalinan, namun untuk pelayanan konseling masih belum memadai.

Pada unsur *Money*, penggunaan anggaran diatur oleh Permenkes Nomor 42 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa salah satu ruang lingkup pemanfaatan DAK BOK meliputi pendanaan UKM Esensial, dimana program KIA-KB merupakan salah satu bagiannya (Kemenkes, 2022). Untuk pelayanan kontrasepsi, pada Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 disebutkan bahwa pembiayaannya ditanggung dalam tarif non kapitasi yang mencakup: prapelayanan kontrasepsi, pemberian pelayanan kontrasepsi dan pasca pelayanan kontrasepsi (Kemenkes, 2023). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pemanfaatan anggaran di UPTD Puskesmas Nusa Penida I pada pelayanan KB Pasca Persalinan sudah memenuhi kaidah yang berlaku.

Pada unsur *Machine*, fasilitas yang menunjang pelaksanaan Pelayanan KB pasca persalinan menurut Pedoman Pelayanan KB Pasca Persalinan di Fasilitas Kesehatan adalah tersedianya ruangan khusus, ABPK atau alat bantu dalam penyampaian konseling KB serta sarana dalam pemberian layanan kontrasepsi (Kemenkes, 2014). Penggunaan ABPK terbukti meningkatkan efektivitas konseling KB (Saraswati *et al.*, 2021). Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa UPTD Puskesmas Nusa Penida I sudah memenuhi aspek tersebut.

Pada unsur *Material*, metode KB modern yang digunakan untuk pasca persalinan yang antara lain IUD, implan, suntik progestin, pil progestin dan kondom. Menurut Peraturan BKKBN Nomor 9 Tahun 2019, jumlah stok minimum alat dan obat kontrasepsi di tataran fasilitas kesehatan adalah stok untuk dua bulan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di UPTD Puskesmas Nusa Penida I masih dalam kondisi memadai (BKKBN, 2019).

Menurut Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat Dalam RPJMN Dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, pedoman yang dijadikan acuan dalam

pelayanan KB pasca persalinan adalah Pedoman Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil dan Pedoman Pelayanan KB Pasca Persalinan di Fasilitas Kesehatan/Pedoman Pelayanan KB. Melihat hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa pedoman yang digunakan oleh UPTD Puskesmas Nusa Penida I dalam pelayanan KB pasca persalinan sudah tepat.

Ditinjau dari aspek proses, pada tahap *Planning*, penghitungan jumlah sasaran pada pelayanan KB pasca persalinan puskesmas adalah jumlah ibu bersalin yang diproyeksikan dengan rumus indikator jumlah ibu bersalin (Kemenkes, 2014). Jumlah sasaran di UPTD Puskesmas Nusa Penida I sudah ditentukan dari Pusdatin Kementerian Kesehatan sehingga tidak diperlukan penghitungan kembali. Penghitungan kebutuhan alokon di UPTD Puskesmas Nusa Penida I sudah sesuai menurut Peraturan BKKBN Nomor 9 Tahun 2019, yaitu dilakukan untuk persediaan dua sampai empat bulan menurut rerata pengeluaran selama tiga bulan termasuk kebutuhan pustu dan jejaring (BKKBN, 2019).

Tahap *Organizing* di UPTD Puskesmas Nusa Penida I sudah memenuhi standar minimal menurut indikator RPJMN 2020-2024, yaitu tenaga yang diperlukan dalam pelayanan KB pasca persalinan adalah dokter atau bidan yang sudah memperoleh pelatihan KBPP dengan jumlah setidaknya dua orang. Seluruh puskesmas pembantu sudah memiliki bidan desa, namun sebagian besar puskesmas pembantu belum memiliki tenaga perawat sehingga meningkatkan beban kerja tenaga bidan.

Pada tahap *Actuating*, konseling KB pasca persalinan dapat dilakukan di semua tempat yang memenuhi syarat, yakni ruangan tertutup yang dapat menjaga kerahasiaan dan keleluasaan pasien dalam mengungkapkan harapan, pemikiran dan perasaan serta menjamin kenyamanan dan rasa aman pasien. Konseling dapat dilakukan pada saat pemeriksaan kehamilan, pada saat mengikuti kelas ibu hamil, selama proses persalinan dan pasca persalinan (Kemenkes, 2014). Konseling KB sebaiknya dilakukan sejak masa kehamilan baik pada pemeriksaan antenatal maupun pada kelas hamil sehingga ibu sudah memiliki perencanaan terkait penggunaan metode KB (Purwaningsih & Rara, 2021). Pasangan yang mendapatkan konseling cenderung menjadi akseptor dibandingkan dengan yang tidak mendapat konseling (Mahardany et al., 2023). Dari hasil wawancara, dapat dilihat bahwa pelaksanaan konseling KB pasca persalinan oleh UPTD Puskesmas Nusa Penida I dilaksanakan pada saat pemeriksaan kehamilan, kelas ibu hamil, proses persalinan serta pasca persalinan saat kunjungan nifas. Tempat pelaksanaannya adalah di Puskesmas (Poli KIA dan ruang bersalin) dan Puskesmas Pembantu (ANC dan persalinan), atau di rumah pasien saat kunjungan nifas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari aspek waktu dan tempat, konseling KB pasca persalinan sudah dilakukan sesuai pedoman.

Tahap *Controlling* pelayanan KB pasca persalinan meliputi pencatatan dan pelaporan (Kemenkes, 2014). Kegiatan pencatatan dilakukan pada form register (kohort KB, kohort nifas), kartu K/IV/KB, K/I/KB, formulir R2/KB dan R1/KB. Pelaporan berupa laporan rutin dikirimkan kepada Dinas Kesehatan dan BKKBN (Kementerian Kesehatan RI, 2014, 2020). Pelaporan bulanan hasil cakupan pelayanan KB Pasca Persalinan yang tertuang pada laporan rutin PWS KIA dan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten. Pelaporan kepada OPD KB melalui PLKB juga dilakukan berupa form K4/KB, form register pelayanan KB (R1/KB) dan register pengeluaran alokon (R2/KB) setiap bulannya. Evaluasi terhadap capaian cakupan pelayanan KB Pasca Persalinan dilakukan pada akhir tahun berjalan oleh Dinas Kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa tahap *controlling* di Puskesmas Nusa Penida I sesuai dengan acuan.

Aspek Output merupakan keluaran atau hasil langsung dari pelaksanaan suatu program. Cakupan KB pasca persalinan di UPTD Puskesmas Nusa Penida I hingga Bulan Mei menurut target tahun 2023 adalah 10,33%. Besar cakupan ini masih tergolong rendah karena belum mencapai setengah dari target yang ditetapkan, yaitu 80%, mengingat periode yang sudah mendekati pertengahan tahun. Selain faktor manajemen, karakteristik PUS seperti tingkat pengetahuan juga memiliki pengaruh terhadap minat menggunakan KB pasca persalinan secara positif (Farhana Niam *et al.*, 2022). Faktor lain yang mempengaruhi keikutsertaan KB pasca persalinan adalah paritas dan dukungan suami (Tuginah, 2020). Dari hasil wawancara tampak bahwa ketiga faktor ini memiliki peranan dalam pengambilan keputusan ber-KB pada pasien di UPTD Puskesmas Nusa Penida I. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah konseling KB pasca persalinan (Sitorus, 2018). Kualitas dari konseling KB juga dipengaruhi oleh faktor pelatihan yang diperoleh oleh bidan (Noviani, 2021). Keadaan ini sejalan dengan situasi di UPTD Puskesmas Nusa Penida I di mana belum ada bidan yang menjalani pelatihan KIP/K.

SIMPULAN

Aspek input terdiri dari *Man, Money, Method, Material* dan *Machine*. Pada unsur *Money, Material, Method* dan *Machine* tidak ditemukan adanya kendala. Pada unsur *Man* ditemukan keterbatasan tenaga di mana tidak ada bidan yang mendapat pelatihan KIP/K dan hanya 2 bidan yang mendapat pelatihan (KB pasca persalinan dan KB pasca plasenta). Selain itu, ditemukan peningkatan beban kerja bidan puskesmas pembantu karena kosongnya tenaga perawat. Pada aspek proses, dari langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelayanan KB pasca persalinan di UPTD Puskesmas Nusa Penida I sudah dilakukan sesuai acuan dan peraturan yang berlaku. Pada aspek *output* ditemukan bahwa cakupan pelayanan KB pasca persalinan di UPTD Puskesmas Nusa Penida I masih tergolong rendah. Faktor penyebab yang ditemukan ada pada unsur *input*, yaitu SDM yang belum mendapat pelatihan KIP/K yang mendukung kualitas konseling KB pasca persalinan.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2017). *Pilihan Metode Kontrasepsi Bagi Masyarakat Umum*. Jakarta: Skata. <http://skata.info>
- BKKBN. (2019). *Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019*.
- BKKBN. *Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan*
- BKKBN. (2022). *Pendataan Keluarga 2022*. <https://portalpk22-pdn.bkkbn.go.id/tabulasi>. Diakses, 25 Juni 2023
- Dinas Kesehatan Provinsi Bali. (2022). *Profil Kesehatan Provinsi Bali 2021*.
- Dinkes Klungkung. (2022). *Profil Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2021*.
- Farhana Niam, N., Kristianti, S., & Ajeng Wijayanti, L. (2022). Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang KB Pasca Salin Dengan Keikutsertaan Menjadi Akseptor KB. *Jurnal Nusantara Medika*, 6(2).

- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Panduan Pelayanan Pasca Persalinan bagi Ibu dan Bayi Baru Lahir. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). Profil Kesehatan Indonesia 2021
- Kementerian Kesehatan RI. (2014). *Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan di Fasilitas Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI.(2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan*
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Perkuat Pelaksanaan Program KB dan Kesehatan Reproduksi*. <https://www.kemenkopmk.go.id/perkuat-pelaksanaan-program-kb-dan-kesehatan-reproduksi>. Diakses, 2 Februari 2023
- Mahardany, B. O., Supriadi, R. F., & Wahida, W. (2023). Pengaruh Konseling terhadap Keputusan Penggunaan KB Pasca Persalinan di Kabupaten Mamuju n Mamuju. *Jurnal Kebidanan*, 13(1), 11–20. <https://doi.org/10.35874/JIB.V13I1.1116>
- Noviani, A. (2021). Analysis Of Factors Affecting The Quality Of Counseling Service Long Term Contraception Method In Puskesmas Serengan Region , Surakarta City. *Journal of Midwifery and Reproduction*, 4(2), 41–50.
- Purwaningsih, R., & Rara, R. (2021). *Hubungan Tingkat Pengetahuan, Sikap Ibu Hamil dan Dukungan Suami Dengan Perencanaan Pemilihan Metode Kontrasepsi Pasca Persalinan Di Puskesmas Samigaluh II Tahun 2021*. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- Saraswati, D. D., Atika, A., & Purwanti, D. (2021). Efektivitas Konseling Kontrasepsi Dengan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) Terhadap Pengetahuan Mengenai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Mkjp). *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal*, 3(3), 235–242. <https://doi.org/10.20473/imhsj.v3i3.2019.235-242>
- Sitorus, F. M. (2018). Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dalam Upaya Mendukung Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu. *Midwifery Journal*, 3(2), 114–119.
- Tuginah. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Alat Kontrasepsi Pasca Salin*. http://repository.poltekkes-smg.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23303&keywords=